KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 1 8 2			H.4 X Final		
DIREKTORAT JENDERAL PA		H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final	
A IDENITITAG DENERUMA DENGUAGUAN YANG DIDOTONG							
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 1 5 9 9 7 2 5 9 5 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : ANDI SUPIYAN NOOR							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PA		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4 21-402-01		7.990.000	7.990.000	0	5	399.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 02645/LS-TJ/RSJD.AHM/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 4 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mmyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
C.2 Nama Instansi Pemerintah	BURAL DATE AND DATE AND						
C.3 ID Subunit Organisasi							
C.4 Tanggal	:	0 4 dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5 Nama Penandatangan	:	RIANDY					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan ba tandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	tan Unifikasi telah sa	ya isi dengan	n benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperk	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	i mengatur bahwa do	kumen ini tel	ah ditandatangani secara	

V8Z5VTPB